

**PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN
SARANA DAN PRASARANA DI SDN CATURTUNGGAL 6
DEPOK SLEMAN**

ARTIKEL JURNAL

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Mahendra Dwi Purnama Putra
NIM 10108244073

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOVEMBER 2014**

PERSETUJUAN

Artikel Jurnal yang berjudul " Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Peagelolaaa Sarana da.n Prasarana di SD Negeri Caturtungial 6 Depok Sleman Yogyakarta" yang disusun oleh Mahendra Dwi Pumama Putra, NIM 10108244073 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dipublikasikan.

Yogyakarta, November 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001



Rahayu Condro Murti, M.Si.
NIP. 19710821 200312 2 001



PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SDN CATURTUNGGAL 6 DEPOK SLEMAN

IMPLEMENTATION OF SCHOOL COMMITTEE FUNCTIONS IN THE MANAGEMENT OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE AT ELEMENTARY SCHOOL OF CATURTUNGGAL 6 DEPOK SLEMAN

Oleh: Mahendra Dwi Purnama Putra, PGSD/PPSD, Universitas Negeri Yogyakarta, Mahe_ndra92@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 6 Depok, Sleman, Yogyakarta. Aspek yang diteliti meliputi peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*Supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan sebagai mediator.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Komite Sekolah. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan uji kredibilitas dengan triangulasi teknik dan sumber.

Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah berperan dalam memberi usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai pada cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana. (2) Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi dukungan (*supporting agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah, hingga memilih barang dan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan. (3) Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana. (4) Peran Komite Sekolah sebagai mediator dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yaitu Komite Sekolah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali murid untuk sekolah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan menjadi penyalur informasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah terkini kepada orang tua wali murid dan masyarakat.

Kata Kunci: *peran Komite Sekolah, sarana dan prasarana*

Abstract

This research was conducted with the aim to describe the implementation of the School Committee facilities and Infrastructures in National Elementary School of Caturtunggal 6 Depok, Sleman, Yogyakarta. Aspects studied include the role of the school committee as giving consideration (advisory agency), supporting (Supporting agency), controlling (controlling agency), and as a mediator.

This study used a qualitative approach to the research subjects with the subject of research was School Committee. Data collection used observation, interview and documentation. The data analysis technique used was the data reduction, data display and conclusion. To test the validity of the data it used the credibility test using triangulation of techniques and sources.

The results of this study were as follows. (1) The role of the School Committee as giving consideration (advisory agency) in improving the quality of school structure and infrastructure was that the school committee gave suggestion and advice beginning from the RKAS preparations, method of procurement of structure and infrastructure to the methods used in conducting the abolition of the structure and

infrastructure. (2) The role of the School Committee as a supporting body (supporting agency) in improving the quality of school structure and infrastructure was that the school committee directly involved in the procurement committees of school structure and infrastructure, to provide fund collection from parents and community to meet the need of school's structure and infrastructure budget, to choose goods and infrastructure that have been unsuitable for the removal. (3) The role of the School Committee as a controlling body (controlling agency) in improving the quality of school facilities and infrastructure were manifested in the participation of the school committee in the meeting of preparation of RKAS, checking directly the condition of existing structure and infrastructure at the school and is always present directly involved in the removal process of structure and infrastructure. (4) The role of the School Committee as a mediator in improving the quality of school facilities and infrastructure were that it became the channel of aspiration and idea of the public at a meeting of planning the provision of structure and infrastructure, to be the channel of funds collected from students' parents for school in the development of the school structure and infrastructure and also supplied information regarding the condition of school facilities and infrastructure development recently to the students' parents and the community.

Keywords : *School Committee role, structure and infrastructure*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan tentunya berguna bagi kemajuan bangsa dan negaranya.

Ada banyak ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari pendidikan. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya pendidikan maka hidup seseorang akan lebih terkontrol dan terkendali dalam menjalani hidup. Pada dasarnya pendidikan dapat diperoleh seseorang tidak hanya di sekolah saja, itu sebabnya kita mengenal adanya pendidikan informal, pendidikan nonformal dan pendidikan formal.

Sekolah bukan sekedar lembaga pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan masyarakat. Siti Irene (2013: 113) sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar meningkatkan kemampuan intelektual, akan tetapi juga membantu anak untuk dapat mengembangkan emosi, berbudaya, bermoral, bermasyarakat, dan kemampuan fisiknya.

Sekolah merupakan salah satu sistem lembaga pendidikan yang paling banyak diminati sebagian besar orang. Lembaga pendidikan ini merupakan jenis pendidikan formal yang ada di tengah masyarakat saat ini. Pada dasarnya lembaga pendidikan sekolah ini juga memiliki tujuan tertentu yang nantinya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti sistem pada suatu lembaga pada umumnya, sekolah juga memiliki susunan organisasi. Organisasi Sekolah yang baik mengkehendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi merata sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan.

Dengan organisasi yang baik, dapat dihindari tindakan kepala sekolah yang menunjukkan kekuasaan yang berlebihan

(otoriter), suasana kerja dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis diantara semua pihak, sehingga hal ini akan mendukung tercapainya tujuan umum dari suatu sekolah tersebut.

Kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Pernyataan tersebut didukung dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pada salah satu misinya dijelaskan agar memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau Komite Sekolah.

Dengan demikian, kepala sekolah wajib untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat, pengurus organisasi pendidikan, dan orang tua dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Pada masa dewasa ini, masih banyak penyelenggaraan pendidikan yang mengesampingkan partisipasi masyarakat, hal ini membuat penyelenggaraan pendidikan berjalan kurang maksimal. Saat ini peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi hal penting untuk segera dimaksimalkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia dapat segera terwujud. Dalam sistem organisasi sekolah terdapat suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka mendukung semua aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah. Badan tersebut dikenal dengan nama komite sekolah.

Menurut Hasbullah (2007:105), pembentukan Komite Sekolah di sekolah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya Komite Sekolah sehingga kurang mendapat perhatian dari sekolah dan hanya dilibatkan pada beberapa kegiatan sekolah yang berhubungan dengan Komite Sekolah.

Tugas utama dari komite sekolah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan, sehingga tercipta suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pendayagunaan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penyalur pemikiran di sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Namun demikian tidak semua tugas dari komite sekolah yang ada di setiap organisasi dapat berjalan dengan baik, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja komite sekolah kurang maksimal misalnya kurangnya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Hal ini membuat sebagian besar kepala sekolah yang ada di setiap sekolah pada umumnya cenderung terlalu dominan dalam mengambil keputusan terkait pembuatan program sekolah, karena merasa bahwa komite sekolah yang ada di sekolahnya tidak memberikan pengaruh yang besar dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Unsur lain yang juga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah yaitu adanya sarana dan prasarana sekolah. Guna memenuhi desain pembelajaran yang ideal di dalam sebuah sekolah, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar yang beragam seperti gedung atau ruangan kelas, media atau alat bantu pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, bahan praktek, dan tentu saja adalah sarana olah raga.

Setelah peneliti melakukan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 di SD Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta, peneliti menemukan fakta bahwa peningkatan kondisi sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Caturtunggal 6 dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masih belum

maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan belum dimilikinya laboratorium khusus di sekolah ini untuk kegiatan praktek mata pelajaran IPA. Selain itu, ruang UKS yang ada di sekolah ini masih menjadi satu dengan rumah dinas penjaga sekolah, alat dan kelengkapan obat yang ada pun juga sangat terbatas. Dari empat kamar mandi yang ada di sekolah hanya dua yang dapat digunakan, sisanya rusak dan tidak terawat. Gudang yang ada di sekolah ini juga kurang dimanfaatkan, barang yang tidak terpakai hanya diletakkan begitu saja di dekat ruang kelas agama Kristen, sehingga mengganggu pandangan saat pembelajaran berlangsung. Untuk laboratorium komputer, dari 20 komputer yang ada di sekolah hanya 8 yang berfungsi normal. Jumlah ini tentu tidak efektif bila digunakan oleh siswa satu kelas yang rata-rata berjumlah 25-30 siswa tiap kelasnya. Hal ini tentu membuat pembelajaran komputer kurang berjalan secara efektif.

Untuk komite sekolah yang ada di sekolah ini sendiri, hanya beberapa anggota komite saja yang aktif terlibat dalam usaha penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini diketahui setelah peneliti melakukan observasi pengecekan buku notulen perumusan program antara pihak komite, kepala sekolah dan guru. Dalam buku tersebut hanya anggota komite tertentu saja yang sering hadir dalam rapat bersama. Ini didukung dengan pernyataan ketua komite yang mengakui bahwa ada beberapa anggota komite yang bekerja masih kurang maksimal

Masih minimnya kualitas sarana prasarana yang ada di SD Negeri Caturtunggal 6 Depok, Sleman Yogyakarta tersebut menarik niat peneliti untuk meneliti permasalahan yang terjadi di SD N Caturtunggal 6 khususnya hubungannya dengan kinerja komite sekolah. Komite sekolah yang menjadi mitra sekolah sebagai badan yang mewadahi peran serta masyarakat di sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan termasuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai sejauh mana peran yang diberikan oleh komite sekolah dalam usaha untuk

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di dalam sebuah sekolah, khususnya di SD Negeri Caturtunggal 6 Depok, Sleman Yogyakarta. Penelitian ini diberi judul pelaksanaan fungsi komite sekolah dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sekolah dasar negeri Caturtunggal 6 Depok, Sleman, Yogyakarta

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian tentang peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana di SD Negeri Caturtunggal 6, yaitu beralamat di jalan janti gang pinus, kelurahan Caturtunggal, kecamatan Depok, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai Agustus 2014.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, cara pengambilan subjek penelitian adalah dengan *purposive*. Suharsimi Arikunto (2010: 183) menjelaskan bahwa dalam *purposive*, cara mengambil subjek penelitian bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Komite Sekolah SD Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting yang ada di dalam suatu proses penelitian, sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang sesuai dapat membantu pencapaian hasil yang valid atau *reliable*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi

Instrumen

Penelitian kualitatif ini menggunakan instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti, dengan instrumen pendukung menggunakan lembar pedoman observasi dan lembar pedoman wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang ditemui peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini berpedoman pada data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan interpretasi data secara deskriptif berupa uraian kalimat sebagai berikut.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Sebelum menyusun program kerja komite bersama dengan kepala sekolah dan guru, komite sekolah pada awalnya sudah memiliki rancangan program kerja sendiri sebelum nantinya diusulkan saat rapat bersama kepala sekolah dan guru. Hal pertama yang dilakukan oleh sekolah sebelum mengadakan sarana dan prasarana yaitu mengadakan rapat bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah untuk melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Dalam rapat bersama proses pengadaan sarana

dan prasarana ini pihak komite sekolah selalu hadir dan memberikan masukan terkait proses pengadaan tersebut. Dalam hal perencanaan ini, peran yang diberikan oleh komite sekolah begitu besar terutama pada penyusunan RKAS.

Setelah semua perencanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana sudah lengkap, selanjutnya yaitu proses pengadaan sarana dan prasarana. dalam hal ini komite sekolah memberikan masukan terkait cara yang akan digunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana, seperti melakukan pembelian atau membangun sarana dan prasarana tertentu. Hal ini tentunya juga dengan persetujuan pihak sekolah. Komite sekolah juga terlibat dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung mushola, ketua panitia pembangunan mushola sendiri berasal dari pihak komite sekolah.

Dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana sekolah seperti kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan penyimpanan komite sekolah tidak terlalu memberikan peran yang besar. Untuk kegiatan pengaturan sarana dan prasarana, wewenang sepenuhnya diberikan kepada pihak sekolah selaku pengelola sarana dan prasarana di sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengaturan sarana dan prasarana berasal dari pihak sekolah, dengan kepala sekolah yang menentukan tugasnya, petugas tersebut bisa berasal dari guru atau karyawan tata usaha. Sama halnya dengan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, semua di bawah control penuh dari pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana sekolah.

Sebelum melakukan penghapusan sarana dan prasarana sekolah, pihak sekolah awalnya meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada pihak komite sekolah, terutama untuk sarana dan prasarana yang pengadaannya berasal dari pihak komite sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencari cara terbaik yang ditempuh agar proses penghapusan sarana dan prasarana yang ada di sekolah lebih efektif dan terlihat transparan bagi semua pihak.

Proses penghapusan sarana dan prasarana di sekolah ini sendiri tidak harus melalui rapat

resmi terlebih dahulu. Pihak sekolah hanya memberikan laporan saja kepada pihak komite sekolah jika terdapat sarana dan prasarana yang sudah tidak layak atau tidak dapat digunakan lagi. Komite sekolah kemudian akan segera mengambil tindakan terkait hal tersebut.

Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah, sebelumnya memang harus dilakukan perencanaan yang benar-benar matang. Pembentukan panitia pembangunan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh sekolah agar proses pembuatan sarana dan prasarana dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Di SD Negeri Caturtunggal 6 ini, panitia pembangunan sarana dan prasarana berasal dari dua pihak yakni pihak komite sekolah dan dari pihak komite sekolah sendiri.

Peran yang dimiliki oleh komite sekolah dalam kepanitiaan proses pengadaan sarana dan prasarana ini juga cukup besar. Bukan hanya sebagai ketua panitia pelaksana pembangunan, peran anggota komite sekolah juga cukup mendominasi dalam tugas sebagai panitia yang ada dibawahnya. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota komite sekolah sebagai pendukung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Selain terlibat aktif dalam kegiatan kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, bentuk dukungan komite sekolah yang menjadi salah satu unsur penting dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah adanya sumbangan dana dari para orang tua wali murid. Komite sekolah berperan vital dalam menggalang dana yang berasal dari pihak orang tua wali murid untuk pembangunan dan pembuatan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan dukungan pengadaan sarana dan prasarana sekolah peran yang diberikan oleh komite sekolah bukan hanya dalam bentuk dana saja, tetapi juga dapat berupa tenaga dan pikiran.

Dalam pengaturan sarana dan prasarana di sekolah dasar komite memang tidak terlalu berperan aktif. Namun demikian komite sekolah

tetap memperhatikan proses dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Untuk sarana Mushola sendiri pemanfaatannya bukan hanya dari pihak sekolah saja, tetapi komite sekolah dan warga sekitar juga ikut menggunakan. Hal ini merupakan bentuk dukungan komite sekolah pada penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pihak komite sekolah tidak semata-mata ikut menggunakan saja, tetapi beliau juga sering memberikan masukan dan usul penambahan fasilitas untuk melengkapi sarana yang sudah ada. Ini dimaksudkan agar penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah bisa lebih optimal. Contohnya seperti pemberian hiasan dinding di mushola, dimaksudkan untuk menambah keindahan mushola, serta menarik minat bagi para warga sekolah untuk rajin beribadah.

Penghapusan sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh sekolah ini biasanya dengan memperbaiki, dan menjual sarana yang sudah tidak dapat digunakan. Tergantung dari bentuk kerusakan sarana prasarana itu sendiri. Dalam melaksanakan proses penghapusan sarana dan prasarana, sekolah juga mendapat dukungan langsung dari pihak komite sekolah. Bentuk dukungan komite sekolah dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana seperti ikut memilih barang atau sarana prasarana yang sudah rusak dan layak untuk diperbarui. Tidak hanya itu saja, kegiatan seperti perbaikan dan penjualan sarana prasarana yang sudah rusak juga menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh pihak komite sekolah. Pada dasarnya pihak komite sekolah di sekolah ini, sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak sekolah untuk mengemban tanggung jawab dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah

Komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan orang tua wali murid juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh sekolah. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah dapat diterima dan mendapat dukungan dari

semua pihak, baik dari komite sekolah, orang tua

wali murid dan masyarakat. Termasuk juga dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sekolah, diperlukan pengawasan dan kontrol dari masyarakat dalam proses pengadaannya, dalam hal ini tugas untuk melakukan pengawasan dan kontrol dilakukan oleh pihak komite sekolah sebagai organisasi yang mewakili aspirasi orang tua wali murid dan masyarakat di dalam sekolah.

Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan menghadirkan komite sekolah sebagai wakil dari orang tua wali murid dan masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam proses perencanaan sarana dan prasarana sekolah seperti ikut dalam penyusunan RKAS. Dengan keikutsertaan pihak komite sekolah dalam penyusunan RKAS maka selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAS juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAS.

Selain melakukan pengawasan pada proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah juga melakukan pengawasan pada proses pengadaannya juga. Salah satu bentuk pengawasan yang diberikan oleh pihak komite sekolah dalam proses pengadaan yaitu pihak komite sekolah terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan terlibatnya komite sekolah bersama dengan beberapa guru menjadi panitia pelaksana pengadaan sarana dan prasarana sekolah, maka komite akan terlibat langsung dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan gedung, pembelian peralatan, perbaikan keramik dan lain-lain. Dengan demikian komite sekolah dapat mengontrol jalannya proses pengadaan sarana dan prasarana dengan maksimal.

Untuk pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, meskipun peran yang diberikan komite sekolah tidak terlalu besar, komite sekolah juga melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan agar komite sekolah dapat

memantau secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang sedang digunakan. Komite sekolah juga kadang melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan datang langsung ke sekolah. Jadi pihak komite sekolah juga memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana, tidak hanya ketika mendapat laporan dari pihak sekolah saja komite sekolah baru datang melakukan pengecekan.

Dalam proses penghapusan sarana dan prasarana sekolah, keterlibatan komite sekolah juga cukup besar. Selama ini penghapusan sarana dan prasarana selalu dibantu oleh pihak komite sekolah, seperti kegiatan penjualan atau pelelangan barang. Penghapusan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah nantinya akan dilaporkan hasilnya pada rapat bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Dalam kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah komite sekolah selalu hadir dan membantu sekolah melaksanakan kegiatan tersebut, meskipun itu bukan kewajiban dari pihak komite sekolah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh komite sekolah dalam usaha ikut mengontrol jalannya proses penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam proses pengadaan sarana dan prasarana sekolah

Setiap awal semester komite sekolah mengadakan pertemuan dengan pihak orang tua wali murid, hal ini dilakukan untuk menampung masukan-masukan dari orang tua wali murid untuk nantinya disampaikan kepada pihak sekolah. Sebagai mediator, komite sekolah harus benar-benar mewakili keberadaan orang tua wali murid di sekolah. Terutama dalam hal penyampaian aspirasi dari orang tua wali kepada pihak sekolah saat rapat bersama antara pihak komite sekolah dengan komite sekolah. Dalam proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini, komite yang ada di sekolah ini sudah melaksanakan hal tersebut.

Pada proses pengadaan sarana dan prasarana, sebagai mediator dari orang tua wali murid dan masyarakat, komite sekolah berperan

sebagai penyalur sumbangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tidak hanya sebatas dana saja, komite sekolah juga menyalurkan bantuan dalam bentuk tenaga untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, yaitu dengan mencarikan tukang untuk ikut dalam pembangunan fasilitas sekolah.

Komite sekolah memang tidak terlalu aktif terlibat dalam kegiatan pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Meskipun demikian, komite sekolah tetap mendapatkan laporan dari pihak sekolah terkait dengan pelaksanaan proses pengaturan dan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Dengan demikian, komite sekolah juga memiliki catatan keadaan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini di sekolah. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam hal ini yaitu, melaporkan catatan yang dimiliki oleh pihak komite sekolah terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah kepada para orang tua wali murid. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab komite sekolah kepada orang tua wali murid yang telah membantu dalam pendanaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah sendiri, meskipun pihak dari orang tua wali murid tidak ikut terjun secara langsung, orang tua wali murid juga mengetahui proses penghapusan tersebut. Ini juga merupakan peran dari komite sekolah yang ada di sekolah ini. Komite sekolah selalu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada di sekolah kepada orang tua wali murid. Hal ini dilakukan agar antara pihak sekolah dengan wali murid tercipta rasa saling transparan melalui adanya komite sekolah. Laporan kondisi sekolah kepada orang tua wali murid dilakukan saat rapat pleno bersama orang tua wali murid awal semester ajaran.

Hambatan Komite sekolah

Dalam penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman Yogyakarta, ada beberapa hambatan yang membuat komite sekolah berperan kurang maksimal di sekolah ini. Sekolah ini kurang

memiliki fasilitas yang lengkap dikarenakan yang pertama masalah dana. Sebagian besar siswa yang berada di SD N Caturtunggal 6 merupakan masyarakat yang berasal dari kalangan menengah kebawah. Hal ini membuat pihak komite sekolah harus bekerja keras mencari tambahan dana lain untuk proses peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Pihak komite sekolah tidak bisa hanya membebankan masalah dana pengadaan sarana dan prasarana hanya kepada pihak orang tua wali murid saja, tetapi juga harus mencari dana lain untuk menutupi kekurangan biaya.

Selain pada permasalahan dana yang minim, faktor lain yang membuat sarana dan prasarana di sekolah ini kurang yaitu terbatasnya lahan milik sekolah. Sempitnya lahan yang dimiliki oleh SD Negeri Caturtunggal 6 membuat proses pembangunan sarana dan prasarana tambahan menjadi terhambat. Sekolah kesulitan untuk mencarikan tempat untuk mendirikan bangunan baru. Selama ini komite sekolah sudah berusaha untuk berbicara kepada pihak kelurahan terkait masalah sempitnya lahan sekolah ini, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah setempat.

Dari pihak komite sendiri, ada beberapa anggota komite sekolah yang bekerja kurang maksimal. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua komite saat melakukan wawancara bersama dengan peneliti. Keaktifan kinerja anggota komite hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Hal ini sering dikeluhkan oleh pihak ketua komite kepada sekolah karena membuat kinerja komite sekolah di sekolah ini juga menjadi terhambat.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komite sekolah yang ada di SD Negeri Caturtunggal 6, telah melaksanakan perannya sebagai: (1) badan pemberi pertimbangan (advisory agency); (2) pendukung (supporting agency); (3) pengontrol (controlling agency); (4) mediator dengan masyarakat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah.

Peran Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam proses peningkatan kualitas

sarana dan prasarana sekolah, komite sekolah sering memberikan usul dan masukan saat rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, juga memberikan usul-usul terkait cara yang akan dilakukan untuk mengadakan sarana dan prasarana di sekolah sampai pada proses penghapusan sarana dan prasarana. Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pernyataan ini didukung oleh Sri Renani (2008: 81), idealnya, sekolah dan yayasan pendidikan harus meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, termasuk juga dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang bersifat *given*, seperti di sekolah swasta dengan ciri khas tertentu. Dalam proses perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah memang harus melibatkan komite sekolah untuk lebih mematangkan perencanaan yang dibuat, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Barnawi (2012: 51) yang mengatakan bahwa proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha dan bendahara, serta komite sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*Supporting agency*), komite sekolah melaksanakan perannya dengan ikut menjadi panitia dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid, memberikan dukungan berupa tenaga pikiran, motivasi serta masukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dukungan yang diberikan komite sekolah ini juga sampai pada tahap penghapusan, hal ini diwujudkan dengan ikut melakukan pemilihan barang dan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah sudah melaksanakan tugas sebagaimana yang harus dilakukan. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung tersebut, didukung oleh pernyataan

Sri Renani (2008:82) komite sekolah memiliki peran sebagai *supporting agency*, badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga dan pikiran. Undang-Undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 56 ayat 1 juga dituliskan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) komite sekolah telah melakukan pengawasan atas penggunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah dengan ikut terlibat dalam penyusunan RKAS bersama kepala sekolah dan guru. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah yaitu komite sekolah juga sering melakukan survey langsung datang ke sekolah untuk melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dalam penghapusan sarana dan prasarana, bentuk pengawasan yang diberikan oleh komite sekolah yaitu hair secara langsung dalam proses penghapusan setelah sebelumnya juga ikut memilih barang atau sarana prasarana yang memang benar layak untuk dilakukan penghapusan. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan pengontrol sudah menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol tersebut didukung pernyataan dari Sri Renani (2008: 82) yang menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency*, badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada sekolah. pengawasan sosial yang dilakukan lebih memiliki implikasi sosial, dan lebih dilaksanakan secara preventif, seperti ketika sekolah menyusun RKAS, atau ketika sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai mediator yaitu dengan menyampaikan aspirasi terhadap program sekolah yang berasal dari masyarakat. Dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, komite sekolah menjadi perantara dari pihak sekolah kepada

masyarakat untuk menyalurkan usul dan masukan saat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sampai pada tahap pelaporan adanya penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi atau dana saja yang disalurkan oleh komite sekolah dari masyarakat kepada sekolah, tetapi juga dalam bentuk ide dan gagasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasbullah (2007: 93) yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 tentang tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah sebagai berikut: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan komite sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai badan pengontrol dalam usaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Bila dilihat dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa peran komite sebenarnya sudah maksimal dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mulai dari tahap perencanaan sarana dan prasarana hingga pada tahap penghapusan sarana dan prasarana. Namun, bila dilihat di sekolah masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar, hal ini disebabkan karena sekolah kurang memiliki lahan yang cukup luas untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana. Selain itu faktor dana juga menjadi hambatan bagi komite sekolah dalam memberikan suntikan dana untuk membangun kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, hal ini di sebabkan sebagian besar orang tua wali murid yang ada di sekolah ini berasal dari golongan menengah kebawah. Untuk kurangnya lahan milik sekolah, usaha yang telah dilakukan oleh komite sekolah dalam mengatasi

hal ini, yaitu komite sekolah sudah berbicara kepada pemerintah daerah setempat untuk meminta lahan tanah lapang yang berada di belakang sekolah untuk digunakan sebagai tempat pembangunan sarana dan prasarana tambahan sekolah. namun sejauh ini belum ada jawaban secara resmi dari pihak pemerintah daerah setempat kepada pihak komite dan sekolah terkait hal ini

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komite sekolah yang ada di SD Negeri Caturtunggal 6 berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut

Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah berperan dalam memberikan usul dan masukan mulai dari penyusunan RKAS, cara pengadaan sarana dan prasarana sampai dengan cara yang digunakan dalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana.

Peran Komite Sekolah sebagai badan pemberi dukungan (*supporting agency*) dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah ikut terlibat langsung dalam kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, melakukan penggalangan dana dari orang tua wali murid dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana sekolah, hingga memilih barang dan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai untuk dilakukan penghapusan.

Peran Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah terwujud dalam keikutsertaan komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, melakukan pengecekan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan selalu hadir terlibat langsung dalam proses penghapusan sarana dan prasarana.

Peran Komite Sekolah sebagai mediator dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah yaitu komite sekolah menjadi penyalur aspirasi dan ide dari masyarakat saat rapat

penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, menjadi penyalur dana yang dikumpulkan dari orang tua wali murid untuk sekolah dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan menjadi penyalur informasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah terkini kepada orang tua wali murid dan masyarakat.

Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah tentu tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan utama yang dihadapi oleh komite sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yaitu masalah dana dan terbatasnya lahan yang dimiliki oleh sekolah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penelitian di lapangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Komite Sekolah di SD Negeri Caturtunggal 6 dalam upaya ikut meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sudah baik.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi sekolah, saran yang pertama sekolah diharapkan untuk terus meningkatkan kerja sama dengan komite sekolah seperti yang sudah dilakukan saat ini terutama dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Kedua, untuk kamar mandi sekolah hendaknya segera dilakukan perbaikan agar para siswa tidak perlu mengantri terlalu lama bila akan ke kamar mandi sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran di sekolah.

Bagi komite sekolah, keaktifan peran komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana hendaknya terus dipertahankan dan

ditingkatkan. Meskipun banyak hambatan yang dihadapi, komite sekolah hendaknya tidak mudah menyerah dan senantiasa berusaha mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Bagi orang tua wali murid, hendaknya terus meningkatkan dalam memberikan dukungan kepada komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Tidak harus berupa dana, dapat juga berupa ide atau gagasan yang inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi & M. Arifin. (2012). *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Jogjakarta: Ruzz Media
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta;
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.Si. dkk. (2008). *Komite sekolah: Sejarah dan prospeknya di masa depan*. Yogyakarta: Hikayat
- Kemendiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Siti Irene. (2013). *Sosiologi Antropologi Pendidikan*. Yogyakarta